

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENSTABILKAN NILAI TUKAR PERDAGANGAN DI TENGAH GEJOLAK PASAR GLOBAL

Kiki Melinda¹, Najunda Cahya Habsari², Khurotul Ayun³, Calvin Nova Putra⁴,
Anang Haris Firmansyah⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: kiki09melinda@gmail.com¹, najundach@gmail.com², khurotulayun141@gmail.com³,
calvinpopon@gmail.com⁴, anangharisfirmansyah@uinsatu.ac.id⁵

Abstrak: Penelitian ini menganalisis intervensi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dalam tengah-tengah tekanan global yang lebih majemuk. BI aktif merealisasikan kebijakan moneter terintegrasi melalui intervensi pasar valuta asing, penyesuaian suku bunga acuan, penguatan likuiditas perbankan, serta optimalisasi instrumen moneter untuk mengamankan daya saing ekspor, stabilitas inflasi, dan kepercayaan investor. Tentunya dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut, banyak tantangan dan risiko yang beragam. Maka dari itu pemerintah bersama dengan BI menegakkan strategi terkoordinasi yang mencakup kebijakan fiskal (insentif ekspor), moneter (intervensi valas dan penguatan cadangan devisa), perdagangan internasional (diversifikasi pasar ekspor), dan kebijakan industri (hilirisasi dan penguatan manufaktur ekspor). Dengan adanya penelitian ini, tentunya bertujuan untuk dijadikan bahan studi bagi peneliti selanjutnya dan para akademika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yang berasal dari jurnal, sumber buku, dan sumber lainnya yang telah terverifikasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa intervensi pemerintah sangat mempengaruhi stabilitas nilai tukar perdagangan di Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya.

Kata kunci: Nilai tukar perdagangan, perdagangan internasional, pasar valas, kebijakan moneter, kebijakan fiskal

Abstract: This study analyzes government and Bank Indonesia (BI) interventions on rupiah exchange rate stability in the midst of more compounded global pressures. BI actively realizes integrated monetary policies through foreign exchange market interventions, benchmark interest rate adjustments, strengthening banking liquidity, and optimizing monetary instruments to mandate export competitiveness, inflation stability, and investor confidence. Of course, in realizing these policies, there are many challenges and various risks. Therefore, the government together with BI enforce a coordinated strategy that includes fiscal policy (export incentives), monetary (forex intervention and strengthening foreign exchange reserves), international trade (diversification of export markets), and industrial policy (downstreaming and strengthening export manufacturing). With this research, of course, it aims to be used as study material for further researchers and academics. The method used in this research uses a literature review approach derived from journals, book sources, and other sources that have been verified. The results of this study explain that government intervention greatly affects the stability of trade exchange rates in Indonesia through its policies.

Keywords: Trade exchange rate, international trade, forex market, monetary policy, fiscal policy

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 669

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu indikator utama ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian negara, terutama untuk negara dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia adalah nilai tukar. Perubahan nilai tukar mempunyai dampak yang luas serta mendalam pada beberapa aspek ekonomi, termasuk inflasi, daya beli masyarakat, investasi, dan kinerja perdagangan internasional (ekspor dan impor). Stabilitas nilai tukar berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan terhadap mata uang domestik, yang kemudian dapat mendorong investasi, baik domestik maupun asing. Selain itu, kestabilan nilai tukar dapat menstabilkan harga impor dan ekspor, memastikan kelancaran operasi perdagangan, serta mendukung daya saing produk nasional di pasar internasional.

Tidak hanya untuk menjaga daya saing produk ekspor dan mengendalikan biaya impor, kestabilan nilai tukar juga berguna sebagai fondasi bagi stabilitas makroekonomi. Saat nilai tukar mengalami lonjakan atau penurunan yang besar, hal itu akan berdampak luas ke seluruh perekonomian, membuat pencapaian tujuan makroekonomi menjadi sangat sulit, seperti menjaga inflasi tetap rendah, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau menarik investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil pemerintah juga Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan daya saing ekspor-impor, tetapi juga berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional secara menyeluruh. Nilai tukar rupiah yang stabil mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat dan menjadi indikator kesejahteraan negara secara umum.

Meskipun pentingnya stabilitas nilai tukar, Indonesia masih rentan terhadap gejolak pasar global karena karakteristiknya sebagai negara dengan ekonomi terbuka dan mengandalkan ekspor komoditas. Berbagai macam faktor eksternal sering menjadi penyebab berubahnya nilai tukar rupiah. Salah satu faktor utamanya yaitu kebijakan moneter dari negara maju, seperti Amerika Serikat melalui bank sentralnya Federal Reserve (The Fed). Ketika The Fed menaikkan suku bunga, investor cenderung mengalihkan dananya ke Amerika demi memperoleh return yang lebih tinggi, yang kemudian dapat mendorong keluarnya modal dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, dan menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika melemah.

Dengan menyadari pentingnya kestabilan nilai tukar, Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang bank sentral secara tegas menetapkan bahwa salah satu peran utama Bank Indonesia (BI) adalah mengatur dan menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Sejarah kebijakan nilai tukar di Indonesia mencerminkan perubahan yang dinamis dalam upaya memenuhi mandat tersebut. Sejak 1967, Indonesia secara bertahap mencabut sistem pengendalian devisa dan mengadopsi sistem devisa bebas. Namun, sistem ini juga mengandung risiko apabila tidak disertai kewaspadaan para pelaku ekonomi.

Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia (BI) memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan moneter yang sifatnya strategis untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Salah satu instrumen utamanya adalah penyesuaian suku bunga acuan (BI *7-Day Reserve Repo Rate*), yang berguna dalam mengendalikan inflasi sekaligus menarik aliran modal masuk. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan intervensi pada pasar valuta asing, dengan cara membeli atau menjual mata uang asing untuk meredam gejolak Rupiah serta menyeimbangkan permintaan-penawaran valas.

Selain itu, BI memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), seperti penerbitan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan Reverse Repo Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor yang lebih panjang, untuk mendorong penyerapan likuiditas dan mengurangi risiko penggunaan likuiditas berlebihan yang dapat menekan nilai tukar. Penyesuaian Cadangan Wajib Minimum (GWM) juga dilakukan untuk mengatur likuiditas dalam perekonomian.

Mengingat kompleksitas interaksi antara kebijakan domestik dan gejolak eksternal yang terus-menerus dalam menjaga stabilitas nilai tukar, penelitian mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak. Pengakuan bahwa kebijakan yang ada, meskipun efektif sampai batas tertentu, "terbatas oleh faktor eksternal di luar kendali BI" dan saran eksplisit tentang "prioritas masa depan" seperti diversifikasi dan pendalaman pasar sangat menyiratkan bahwa stabilisasi nilai tukar adalah tantangan yang berkelanjutan dan dinamis, bukan masalah dengan solusi statis. Ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan berada dalam proses pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia beradaptasi dan merespons dinamika global, juga mengkaji arah kebijakan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Upaya seperti peningkatan melalui kebijakan fiskal dan moneter perlu diselaraskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Fokus utama mencakup peningkatan cadangan devisa, ekspor bernilai tambah, dan penguatan pasar keuangan domestik agar ekonomi lebih tangguh terhadap tekanan global dan nilai tukar tetap stabil.

KAJIAN LITERATUR

Teori Dasar Nilai Tukar Perdagangan

Nilai tukar perdagangan (*term of trade*) merupakan rasio harga komoditi ekspor terhadap harga komoditi impor. Peningkatan atau perbaikan nilai tukar perdagangan (*term of trade*) di suatu negara akan dianggap menguntungkan bagi negara itu sendiri, karena harga yang diperoleh negara tersebut dari ekspor akan meningkat secara relatif dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh produk impor. (Puspasari & Darmawan, 2017) Apabila kenaikan harga komoditas ekspor harga komoditas impor, maka indeks *term of trade* akan meningkat. Ini berarti ekspor dikurangi guna mengimbangi impor. Begitu pula sebaliknya, jika komoditas impor > komoditas ekspor, maka indeks *term of trade* akan menurun. Dalam artian komoditas ekspor lebih banyak guna mengimbangi impor. Rumus dalam menghitung *term of trade* yakni:

$$TOT = (\text{rata-rata indeks harga ekspor} / \text{rata-rata indeks harga impor}) \times 100$$

Jika *term of trade* < 100%, maka arus modal keluar (pembelian barang impor) lebih banyak daripada pembelian. Pada saat yang sama, jika *term of trade* 100% itu berarti negara tersebut telah mengakumulasi modal (lebih banyak modal berasal dari ekspor).

Tukar internasional atau *Terms of Trade* merupakan perbandingan antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor suatu negara dalam perdagangan internasional. Terdapat tiga konsep utama dalam tukar internasional, yaitu:

1. *Net Barter Terms of Trade* (NBTT)

Net Barter Terms of Trade (NBTT) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan harga antara ekspor dan impor suatu negara. NBTT mengukur sejauh mana perdagangan internasional menguntungkan suatu negara dari sisi harga. NBTT dihitung dengan membagi indeks harga ekspor dengan indeks harga impor, kemudian dikalikan dengan 100. Rumus ini memberikan gambaran apakah suatu negara mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional.

Jika nilai NBTT > 100, berarti harga barang ekspor lebih tinggi daripada harga barang impor, yang menunjukkan perdagangan internasional yang menguntungkan. Sebaliknya, jika NBTT < 100, berarti negara harus mengekspor lebih banyak barang untuk memperoleh jumlah barang impor yang sama, yang menandakan kondisi perdagangan yang kurang menguntungkan. NBTT hanya mengukur perubahan harga dan tidak memperhitungkan volume perdagangan. Artinya, meskipun NBTT suatu negara

meningkat, negara tersebut masih dapat mengalami defisit perdagangan jika volume impornya jauh lebih besar dibandingkan eksportnya

2. *Grosser Terms of Trade* (GBTT)

GBTT digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengukur rasio volume barang impor yang diterima dengan volume barang ekspor yang dikirim. Berbeda dengan NBTT yang fokus pada harga, GBTT lebih memperhatikan jumlah fisik barang yang diperdagangkan.

Dengan kata lain, GBTT menunjukkan seberapa banyak barang impor yang dapat diperoleh dari setiap unit barang ekspor. Peningkatan GBTT menunjukkan bahwa negara dapat mengimpor lebih banyak barang dari jumlah ekspor yang sama, mengindikasikan kondisi perdagangan yang lebih menguntungkan secara volume.

Namun, GBTT tidak memperhitungkan fluktuasi harga. Jadi meskipun volume impor meningkat, nilai ekonomi barang tersebut mungkin rendah jika harga barang impor turun. Salah satu kelemahan GBTT adalah ketidakmampuannya mencerminkan perubahan nilai atau keuntungan ekonomi secara keseluruhan karena hanya berfokus pada kuantitas.

3. *Income Terms of Trade* (ITT)

Income Terms of Trade (ITT) adalah indikator ekonomi yang mengukur kemampuan suatu negara dalam membeli barang impor menggunakan pendapatan dari ekspor. ITT dihitung dengan mengalikan NBTT (rasio harga ekspor terhadap harga impor) dengan volume ekspor.

Peningkatan ITT menunjukkan daya beli yang lebih besar, artinya negara dapat membeli lebih banyak barang impor dengan pendapatan dari eksportnya. Sebaliknya, penurunan ITT menunjukkan daya beli yang menurun, yang dapat merugikan perekonomian domestik.

ITT membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memahami dampak fluktuasi harga global terhadap kesejahteraan ekonomi nasional. Kenaikan harga ekspor akan meningkatkan ITT dan memperkuat daya beli. Sementara penurunan harga ekspor atau ketergantungan pada barang impor dengan harga tinggi dapat memperlemah ITT. (Ramadani et al., 2024)

Faktor Penentu Nilai Tukar Perdagangan di Indonesia

Nilai tukar perdagangan atau *terms of trade* merupakan perbandingan antara harga ekspor dan impor suatu negara. Di Indonesia, nilai tukar perdagangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk kebijakan Bank Indonesia (BI), kebijakan fiskal pemerintah, serta faktor eksternal. (Harahap et al., 2024)

1. Kebijakan Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai kebijakan moneter. Beberapa kebijakan tersebut meliputi:

a. Suku bunga acuan (BI Rate/SBI/BI-7DRR):

Ketika suku bunga ini dinaikkan, investor asing akan lebih tertarik menanamkan modal di instrumen keuangan Indonesia karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan masuknya arus modal asing ke dalam negeri, yang meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan memperkuat nilai tukar. Dampaknya, harga barang impor menjadi lebih murah karena nilai tukar rupiah yang lebih kuat, dan ini akan memengaruhi rasio nilai tukar perdagangan antara ekspor dan impor.

b. Intervensi di pasar valas:

Intervensi ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli valuta asing (biasanya dolar AS) guna mengendalikan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Stabilitas nilai tukar sangat penting agar pelaku perdagangan internasional dapat memprediksi

biaya dan keuntungan secara lebih akurat, serta untuk mencegah ketidakpastian dalam kegiatan ekspor dan impor.

c. Pengelolaan cadangan devisa:

Yaitu dengan kumpulan aset luar negeri berupa mata uang asing yang digunakan untuk keperluan transaksi internasional, termasuk membayar impor, melunasi utang luar negeri, dan menjaga kepercayaan investor. Jika cadangan devisa mencukupi, Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah meskipun terjadi tekanan dari luar negeri. Cadangan devisa yang kuat juga mencerminkan ketahanan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. (Ningtiyas, 2024)

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara melalui pajak dan belanja negara. Beberapa pengaruhnya terhadap nilai tukar perdagangan antara lain:

a. Subsidi dan insentif fiskal

Kepada sektor-sektor unggulan, seperti industri pengolahan kelapa sawit, batu bara, karet, nikel, serta produk-produk manufaktur. Subsidi ini dapat berupa bantuan langsung, pemotongan pajak, atau pembiayaan berbunga rendah yang diberikan kepada pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi sehingga harga jual produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Insentif juga diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan dan fasilitas bea keluar nol untuk produk-produk strategis.

b. Kebijakan pajak Impor dan Ekspor

Selain mendorong ekspor, kebijakan fiskal juga dapat diarahkan untuk mengendalikan impor. Salah satu caranya adalah melalui pengenaan tarif atau pajak impor yang tinggi terhadap barang-barang yang dianggap tidak prioritas atau yang produksinya dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku industri lebih terdorong untuk menggunakan produk lokal, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan memperbaiki neraca perdagangan. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk memberikan insentif pajak bagi investor asing atau pengusaha domestik yang ingin membangun industri substitusi impor, sehingga Indonesia mampu memproduksi barang yang selama ini harus diimpor dari luar negeri. (Miswar & Shaputri, 2023)

3. Kebijakan Eksternal

Faktor eksternal merupakan segala hal yang berasal dari luar negeri yang memengaruhi perekonomian dan perdagangan internasional Indonesia.

a. Perubahan harga komoditas global

Indonesia merupakan negara pengekspor utama berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, karet, nikel, dan tembaga. Apabila harga komoditas tersebut mengalami kenaikan di pasar internasional, maka pendapatan ekspor Indonesia meningkat. Hal ini berdampak positif terhadap nilai tukar perdagangan karena nilai ekspor menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Sebaliknya, jika harga komoditas dunia turun, maka pendapatan dari ekspor menurun dan menyebabkan nilai tukar perdagangan melemah.

b. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

terutama pada dolar Amerika Serikat (USD), karena sebagian besar transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang tersebut. Apabila nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah, maka harga barang impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini bisa berdampak negatif pada impor, tetapi di sisi lain dapat

membuat barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar luar negeri. Namun demikian, fluktuasi yang tidak stabil atau terlalu tajam dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan pelaku usaha dan mengganggu arus perdagangan.

Studi Terdahulu

Penelitian tahun 2023 oleh Nawiyah, dkk., yang mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dengan konteks perdagangan internasional, yaitu dengan menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dirumuskan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal tersebut berkaitan dengan ekonomi makro, pendapatan negara, dan kerja sama internasional. Contoh penerapan kebijakan fiskal yaitu peningkatan pajak penghasilan (PPH) terhadap barang impor, yang bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan yang dapat melemahkan Rupiah. Sedangkan untuk kebijakan moneter diatur oleh Bank Indonesia. Beberapa alat kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia yaitu penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, intervensi valuta asing, dan penyediaan swap valas BI. (Nawiyah et al., 2023)

Kemudian penelitian tahun 2025 oleh Fany Raditya Rahayu, dkk., yang mengemukakan bahwa dalam upayanya menstabilkan nilai tukar Rupiah, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia selaku bank sentral menerapkan kebijakan moneter. Dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya intervensi pasar valuta asing, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, menjaga struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas, dan memperkuat strategi transaksi *term-repo* dan swap valas. (Rahayu et al., 2025)

METODE

Pengkajian ini merupakan jenis kajian literatur, data-data dari *literatur review* ini digunakan sebagai sumber acuan untuk melihat kebijakan pemerintah Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar perdagangan di tengah gejolak pasar global akhir-akhir ini. Sumber data pada pengkajian ini adalah data sekunder. Data merupakan faktor yang paling penting dalam pembuatan karya ilmiah. Dalam pengkajian ini, data sekunder berasal dari *website* berita dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam kajian ini yakni tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar perdagangan melalui beberapa kebijakan seperti kebijakan fiskal dan moneter.

Sehubungan dengan penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan *Systematic Literatur Review* (SLR) yaitu mengumpulkan data dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dan disusun menjadi sebuah jurnal. Tujuan metode SLR adalah untuk mengenali, meninjau, dan mengevaluasi semua penelitian yang relevan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ditetapkan oleh beberapa sumber jurnal yang ditulis oleh peneliti.

HASIL & PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia

Dalam menghadapi tekanan global yang berdampak pada nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan pasar. Stabilitas nilai tukar merupakan faktor krusial dalam menjaga daya saing ekspor, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mempertahankan kepercayaan investor domestik maupun asing. Oleh karena itu, BI menerapkan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing, penyesuaian suku bunga acuan, penguatan likuiditas perbankan, hingga optimalisasi instrumen moneter. Uraian berikut menjelaskan secara rinci langkah-langkah tersebut beserta dampaknya terhadap stabilitas rupiah di tengah tantangan ekonomi global.

Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar Amerika Serikat. Intervensi ini dilakukan melalui pasar *spot* dan instrumen *non-deliverable forward* (NDF), yang bertujuan meredam volatilitas jangka pendek. Selain di pasar domestik, BI juga aktif di pasar *offshore* seperti Asia, Eropa, dan New York. Langkah ini menunjukkan keseriusan BI dalam menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap rupiah di tengah tekanan global akibat kebijakan suku bunga tinggi negara maju dan ketegangan geopolitik yang meningkat (Peshimam, 2025).

Pada bulan Mei 2025, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Kebijakan ini diambil secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar. Penurunan suku bunga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit dan konsumsi domestik tanpa memicu arus modal keluar yang bisa melemahkan rupiah. Suku bunga yang kompetitif tetap dijaga agar pasar keuangan Indonesia tetap menarik bagi investor asing (Indonesia, 2025).

Untuk menjaga kelancaran sistem keuangan domestik, Bank Indonesia menurunkan rasio cadangan sekunder perbankan dari 5% menjadi 4%, efektif mulai Juni 2025. Kebijakan ini memberikan tambahan likuiditas sebesar Rp78,45 triliun ke dalam sistem perbankan. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk meningkatkan penyaluran kredit, memperkuat permintaan domestik, dan menjaga stabilitas sektor keuangan secara umum. Stabilitas sektor keuangan yang solid akan memperkuat daya tahan rupiah terhadap tekanan eksternal (Suroyo, 2025).

Selain itu, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneter dengan mengurangi *outstanding* Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp40 triliun. Tujuan dari pengurangan ini adalah meningkatkan likuiditas di pasar uang domestik, sehingga mendukung transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif. Dengan meningkatnya likuiditas, aktivitas di pasar keuangan dapat berjalan lebih lancar, termasuk perdagangan valas yang berperan penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di pasar internasional (Sulaiman & Suroyo, 2025).

Tantangan dan Risiko

Meskipun kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menunjukkan keseriusan dan koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan dan risiko yang kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satu kebijakan utama yang digunakan adalah intervensi aktif di pasar valuta asing, terutama melalui pasar *spot* dan *non-deliverable forward* (NDF). Kebijakan ini bertujuan untuk menahan laju depresiasi rupiah yang terlalu tajam dan menjaga ekspektasi pelaku pasar. Namun, terlalu seringnya intervensi justru bisa menimbulkan ketergantungan pasar terhadap langkah BI. Hal ini berisiko menciptakan disinsentif bagi pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) secara mandiri, serta dapat menguras cadangan devisa negara jika tekanan terhadap rupiah berlangsung lama. Jika cadangan devisa terus menurun, ruang kebijakan moneter BI akan semakin terbatas dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Selain itu, penyesuaian suku bunga acuan (BI-Rate) yang dilakukan BI untuk merespons perlambatan ekonomi global juga membawa risiko tersendiri. Penurunan suku bunga bertujuan untuk merangsang konsumsi dan investasi domestik, namun di tengah kondisi global yang masih dipengaruhi oleh suku bunga tinggi dari bank sentral negara maju seperti The Fed, langkah ini dapat menurunkan daya tarik aset keuangan domestik. Akibatnya, investor asing berpotensi menarik dananya keluar dari Indonesia (*capital outflow*), sehingga menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, keputusan penyesuaian suku bunga harus diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas eksternal dan pemulihan ekonomi domestik.

Tantangan lainnya datang dari kebijakan pelonggaran likuiditas melalui penurunan rasio cadangan sekunder perbankan. Langkah ini memang memberikan tambahan ruang likuiditas yang cukup besar bagi perbankan, namun jika likuiditas tersebut tidak terserap secara efektif

ke sektor riil, maka akan muncul risiko kelebihan uang beredar yang bisa memicu tekanan inflasi. Lebih jauh lagi, kelebihan likuiditas yang tidak tersalurkan ke sektor produktif dapat dialihkan ke aktivitas spekulatif seperti perdagangan aset keuangan jangka pendek atau properti, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian.

Pengurangan *outstanding* Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang bertujuan untuk mengoptimalkan instrumen moneter dan meningkatkan likuiditas pasar juga memiliki potensi risiko. Jika pasar memandang langkah ini sebagai sinyal pelemahan kemampuan BI dalam mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas nilai tukar, maka kepercayaan investor bisa menurun. Hal ini akan meningkatkan premi risiko terhadap aset keuangan Indonesia, dan dapat memperlemah rupiah lebih lanjut. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada kredibilitas Bank Indonesia dan persepsi pasar terhadap arah kebijakan moneter ke depan. Di luar faktor domestik, tantangan terbesar bagi stabilitas nilai tukar rupiah tetap berasal dari ketidakpastian eksternal. Perang dagang, gejolak geopolitik, perubahan harga komoditas dunia, serta kebijakan suku bunga global, semuanya sangat berpengaruh terhadap arus modal dan nilai tukar. Dalam situasi seperti ini, fleksibilitas, koordinasi lintas lembaga, dan komunikasi kebijakan yang transparan menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Gejolak Pasar Global

Dalam menyikapi ketidakpastian pasar global dan menjaga kestabilan nilai tukar, pemerintah Indonesia perlu mengimplementasikan berbagai strategi kebijakan yang terencana dan terkoordinasi. Strategi ini mencakup kebijakan fiskal, moneter, kebijakan perdagangan internasional, serta penguatan sektor industri. Dengan pendekatan menyeluruh, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan daya saing ekspornya, meningkatkan daya tahan ekonomi, dan meminimalkan pengaruh gejolak eksternal terhadap perekonomian negara.

Pertama dengan kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif untuk perusahaan atau pelaku usaha yang mengeksport komoditas dengan nilai tambah. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, subsidi ekspor, bantuan teknis, hingga penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan internasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah membantu perusahaan serta pelaku usaha domestik untuk bersaing di pasar global dan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. (Ramadani et al., 2024) Kedua dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat menjaga kestabilan nilai tukar melalui intervensi pasar valas, meningkatkan cadangan devisa, serta memperluas penggunaan mata uang domestik dalam transaksi kerja sama perdagangan bilateral. Intervensi pasar valas dilakukan untuk memperlancar perubahan nilai tukar uang domestik yang bersangkutan, menjaga nilai tukar mata uang domestik agar berada dalam rentang yang ditetapkan, dapat mempengaruhi variabel makro, seperti inflasi, suku bunga, dan pendapatan. (Pangestuti, 2020)

Ketiga dengan kebijakan perdagangan internasional, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu diversifikasi pasar ekspor serta melakukan negosiasi terkait kesepakatan perdagangan baru dengan negara-negara yang sebelumnya belum menjadi tujuan utama perdagangan. Melalui diversifikasi ekspor, suatu negara dapat memperoleh beberapa manfaat, seperti menstabilkan ekspor, meningkatkan nilai tambah barang, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan jumlah produk yang banyak, penurunan ekspor di satu produk dapat diimbangi oleh kenaikan ekspor produk lainnya. Selain itu, diversifikasi ekspor juga dipercaya mampu mendorong perluasan pengembangan teknologi serta menguatkan hubungan timbal balik antarsektor ekonomi. (Susila, 2022)

Keempat kebijakan industri, yang bertujuan untuk memastikan Indonesia bukan sekadar mengeksport bahan mentah, melainkan juga berdaya saing dalam memproduksi produk olahan bernilai tambah tinggi di pasar internasional. Beberapa strategi kebijakan industri yang bisa

diterapkan oleh pemerintah Indonesia meliputi hilirisasi komoditas untuk menghasilkan ekspor bernilai tambah, pengembangan industri manufaktur yang berorientasi ekspor seperti tekstil dan elektronik, juga penguatan rantai pasok dalam negeri demi mengurangi impor bahan baku.

KESIMPULAN

Bank Indonesia secara aktif menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, penyesuaian suku bunga acuan, penguatan likuiditas perbankan, dan optimalisasi instrumen moneter. Langkah-langkah ini terbukti penting dalam meredam volatilitas nilai tukar, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mempertahankan kepercayaan investor domestik dan asing di tengah tekanan global.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah menghadapi kendala signifikan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Intervensi yang terlalu sering dapat menimbulkan ketergantungan pasar dan menguras cadangan devisa. Penyesuaian suku bunga dan pelonggaran likuiditas juga membawa risiko *capital outflow* dan potensi inflasi. Selain itu, ketidakpastian eksternal seperti perang dagang dan perubahan suku bunga global tetap menjadi ancaman utama yang harus diantisipasi melalui koordinasi dan komunikasi kebijakan yang efektif.

Pemerintah menerapkan strategi terpadu yang mencakup kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan internasional, dan penguatan sektor industri. Insentif fiskal bagi eksportir, intervensi pasar terhadap nilai tukar, diversifikasi pasar ekspor, dan industrialisasi menjadi pilar utama dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia serta meminimalisir dampak volatilitas eksternal terhadap nilai tukar dan perdagangan Indonesia.

Penguatan sektor industri dikonsentrasikan pada hilirisasi komoditas dan pembangunan industri manufaktur yang berorientasi pasar ekspor. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat nilai tambah produk ekspor, memperluas pasar, dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Dengan demikian, struktur ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan dinamika perdagangan global.

Secara keseluruhan, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia, dibantu strategi lintas sektor, terbukti krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan daya saing perdagangan Indonesia. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada respon adaptif terhadap tantangan eksternal dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

REFERENSI

- Harahap, E. S., Affandi, M. R., & Situmorang, E. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 13-22.
- Indonesia, B. (2025). *Press Release: BI Rate Turun 25 bps menjadi 5,50%*.
- Miswar, & Shaputri, E. (2023). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional dan Nilai Tukar di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 7(2), 321-332.
- Nawiyah, N., Aprilia, M., Febriningrum, N. S., & Jihanisa, N. (2023). Upaya pemerintah menstabilkan mata uang dalam perdagangan internasional. *Jurnal Economina*, 2(12), 3768-3776.
- Ningtiyas, S. D. A. (2024). Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 723-726.
- Pangestuti, D. C. (2020). *Manajemen Keuangan Internasional*. Deepublish.
- Peshimam, G. (2025). *Indonesia to Intervene Aggressively when Domestic Markets Re-open*. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-intervene-aggressively-when-domestic-markets-reopen-2025-04-07/>
- Puspasari, N. K., & Darmawan, A. (2017). *Pengaruh Ekspor Dan Nilai Tukar Perdagangan (Terms Of Trade) Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Studi Periode 2008-2016)*. Universitas Brawijaya.
- Rahayu, F. R., Abidah, N. F. N., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi Implementasi Kebijakan Moneter

- dan Strategi Adaptasi Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 2183-2189.
- Ramadani, A., Elviana, Y. E., & Mudlofar, M. K. (2024). Konsep Terms Of Trade dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Suatu Negara. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 273-281.
- Sulaiman, S., & Suroyo, G. (2025). *Indonesia Central Bank Seeks balance between Growth and Price Stability*. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-central-bank-seeks-balance-between-growth-price-stability-2025-05-07/>
- Suroyo, G. (2025). *Indonesia Central Bank to Give Nearly \ \$5 Billion Flexibility to Banks*.
- Susila, W. R. (2022). *Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan, dan Terapan*. Prasetya Mulya Publishing.